

## **ABSTRAK**

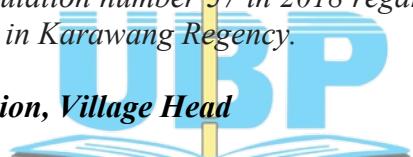
Berbeda dengan sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif, sampai pemilihan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati yang penyelesaiannya diatur oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sengketa dalam pemilihan Kepala Desa penyelesaiannya diserahkan kepada Bupati. Hal ini menjadi pertaruhan netralitas Bupati karena Bupati adalah jabatan politik sehingga penyelesaiannya dianggap tidak netral. Penelitian ini dilakukan di Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa wadas dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa wadas dihubungkan dengan pasal 63 Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Metode penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Hipotesa penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Wadas Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang yang dihubungkan dengan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang adalah tidak adanya mekanisme tentang penyelesaian sengketa kepala desa di Kabupaten Karawang.

**Kata Kunci:** Penyelesaian, Pemilihan, Kepala Desa

## **ABSTRACT**

*In contrast to the disputes over the Election of President and Vice President, the Legislative Election, until the election of Regional Heads of both Gunernur and Regents whose arrangements are regulated by Law Number 7 of 2017 Regarding General Elections, disputes in the selection of Village Heads shall be submitted to the Regent. This becomes a gamble on the Regent's neutrality because the Regent is a political office so the settlement is considered not neutral. This research was conducted in Wadas Village, Teluk Jambe Timur District, Karawang Regency. The purpose of this study was to find out the mechanism of dispute resolution in the election of Wadas village heads and to find out the inhibiting factors in settling disputes over the selection of Wadas village heads. Election of Village Head in Karawang Regency. To achieve these objectives the authors use data collection techniques in the form of library research and field research by conducting interviews directly with the speakers. The research method was carried out using a qualitative method and the approach used was empirical juridical. The hypothesis of this study shows that the settlement of village head election disputes in Wadas Village, Teluk Jambe Timur District, Karawang Regency, which is connected with article 63 of Regent's Regulation number 57 in 2018 regarding the procedures for Election of Village Heads in Karawang Regency.*

**Keywords:** *Dispute, Election, Village Head*



**KARAWANG**